

EVALUASI DOMAIN MANAJEMEN SPBE PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PAN-RB NOMOR 59 TAHUN 2020

Decky S Putra¹, Selo², Silmi Fauziati³

^{1,2,3}Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Email: ¹decky5383@mail.ugm.ac.id, ²selo@ugm.ac.id, ³silmi@ugm.ac.id

(Naskah masuk: 14 Maret 2022, diterima untuk diterbitkan: 29 Maret 2022)

Abstrak

Dalam rangka menjaga kualitas pelayanan elektronik agar cepat, efisien dan nyaman, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Terdapat satu domain baru dalam pedoman Evaluasi pelaksanaan SPBE yaitu Domain Manajemen SPBE bila dibandingkan dengan pedoman pengelolaan SPBE sebelumnya yaitu Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018. Apabila indeks Domain Manajemen SPBE tidak diketahui, berarti tingkat penerapan Domain Manajemen SPBE juga tidak bisa diukur sehingga berakibat kesulitan dalam perencanaan penerapan SPBE di masa yang akan datang. Efeknya adalah penerapan SPBE berjalan tidak sesuai rencana atau bahkan terjadi kegagalan dalam penerapan SPBE. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat kematangan Domain Manajemen SPBE di Pemerintah Kota Yogyakarta melalui penilaian Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Audit TIK. Penilaian terhadap indikator dilakukan melalui wawancara, tanya jawab dan bukti pendukung. Berdasarkan nilai indeks aspek tersebut, dapat ditentukan nilai indeks dari Domain Manajemen SPBE yang kemudian dihubungkan dengan tabel predikat penilaian SPBE untuk mengetahui predikat penerapan Domain Manajemen SPBE. Hasil penelitian menunjukkan indeks Domain Manajemen SPBE adalah 2,2 sehingga tingkat penerapan SPBE pada Domain Manajemen SPBE di Kota Yogyakarta termasuk kedalam predikat "Cukup". Rekomendasi yang diberikan antara lain mengembangkan regulasi internal tentang tata cara pengelolaan data, merekrut tenaga teknis untuk memenuhi kebutuhan kompetensi SDM, menambahkan aplikasi manajemen pengetahuan pada platform Jogja Smart Service, mengirimkan permohonan audit infrastruktur dan audit aplikasi TIK kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional serta membuat permohonan untuk audit keamanan TIK kepada Badan Siber dan Sandi Negara.

Kata kunci: *SPBE, Evaluasi, pelayanan publik elektronik, E-Government, maturity level.*

EVALUATION OF SPBE MANAGEMENT DOMAIN OF YOGYAKARTA CITY GOVERNMENT BASED ON REGULATION OF THE MINISTER OF PAN-RB NUMBER 59 OF 2020

Abstract

To maintain the quality of electronic services to be fast, efficient, and convenient, the government has issued Ministerial Regulation PAN-RB Number 59 of 2020 concerning Guidelines for Evaluation of the Implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE). There is one new domain in the SPBE implementation evaluation guideline, namely the SPBE Management Domain when compared to the previous SPBE management guidelines, namely the PANRB Ministerial Regulation Number 5 of 2018. If the SPBE Management Domain index is not known, it means that the level of SPBE Management Domain implementation cannot be measured, resulting in difficulties in planning the implementation of SPBE in the future. The effect is that the implementation of the SPBE does not go according to plan or there is even a failure in the implementation of the SPBE. This study aims to determine the maturity level of the SPBE Management Domain in Yogyakarta City Government through the assessment of SPBE Management Implementation Aspects and ICT Audit Aspects. Assessment of indicators is done through interviews, questions, answers, and supporting evidence. Based on the index value of these aspects, it can be determined the index value of the SPBE Management Domain is then linked to the SPBE assessment predicate table to determine the implementation predicate of the SPBE Management Domain. The results showed that the SPBE Management Domain index was 2.2 so that the level of

SPBE implementation in the SPBE Management Domain in Yogyakarta City was included in the "Enough" predicate. The recommendations given included developing internal regulations on data management procedures, recruiting technical personnel to meet HR competency needs, adding knowledge management applications on the Jogja Smart Service platform, sending requests for infrastructure audits and ICT application audits to the National Research and Innovation Agency, and making requests for ICT security audits to the National Cyber and Crypto Agency.

Keywords: *SPBE, Evaluation, electronic public services, E-Government, maturity level.*

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, pemerintah dituntut untuk menyesuaikan pelayanan sesuai dengan keadaan teknologi saat ini. Pelayanan publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dasar dari warga negara [1][2]. Publik saat ini menginginkan pelayanan yang efisien, cepat dan mudah. Menanggapi masalah ini, pemerintah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan layanan publik melalui kebijakan e-government. [3].

Strategi pengembangan dan penerapan e-government telah ditetapkan secara nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Peraturan ini memuat pertimbangan bahwa dengan menerapkan *e-government* terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi pada pemerintahan supaya tercipta *good governance* [4]. Pemerintah melalui e-government dapat melakukan interaksi dan menyebarkan informasi tidak hanya kepada publik, namun juga kepada lembaga pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah [5].

Tahun 2018, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia [6] yang memuat perintah untuk melakukan tatakelola terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berjalan di lembaga negara, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tujuan dari hal ini adalah mengetahui tingkat penerapan SPBE pada lembaga negara dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dan lembaga negara diharapkan menjalankan SPBE dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dan infrastruktur SPBE. Infrastruktur SPBE ini sendiri terdiri dari *software*, *hardware*, dan segala macam fasilitas penunjang sistem agar menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik [6]. Kementerian PANRB telah mengeluarkan pedoman evaluasi SPBE pada tahun 2018 melalui Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2018 yang berisi 3 domain, 7 aspek dan 35 indikator [7]. Namun kemudian peraturan ini dicabut dikarenakan ada beberapa amanat perpres yang belum termuat didalamnya.

Tahun 2020, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kemudian menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 yang berisi pedoman pelaksanaan evaluasi tingkat kematangan SPBE untuk pemerintah pusat, lembaga negara maupun pemerintah daerah. Peraturan ini menggunakan pedoman sesuai panduan *Capability Maturity Model Integration (CMMI)* untuk melakukan penilaian terhadap *maturity level* pada kapabilitas proses. Pada penilaian *maturity level* pada kapabilitas layanan, digunakan *E-Government Maturity Model*. Pedoman pada peraturan ini berisi 47 indikator, 4 domain, dan 8 aspek [8]. Hal yang berbeda dari pedoman sebelumnya adalah terdapat satu domain baru yaitu Domain Manajemen SPBE. Domain ini tidak ada pada pedoman evaluasi sebelumnya. Hasil dari evaluasi tingkat kematangan penerapan SPBE ini berupa nilai indeks yang menunjukkan *maturity level* pelaksanaan SPBE dari lembaga negara atau pemerintah daerah.

Penelitian tentang bagaimana indikator-indikator evaluasi SPBE diterapkan pada pelayanan publik pada tingkat kecamatan yang telah menggunakan sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) telah dilakukan [9]. Penelitian ini menggunakan panduan evaluasi SPBE yang sesuai dengan Peraturan Presiden [6]. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pelayanan PATEN masih banyak terdapat indikator yang belum terpenuhi jika menggunakan pedoman evaluasi SPBE pada layanan elektronik untuk publik di tingkat kecamatan.

Penelitian lain mengenai evaluasi tingkat kematangan SPBE adalah penelitian untuk menilai kematangan penerapan SPBE di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Banjar [10]. Penelitian ini menggunakan CMMI Dev. 1.3 untuk mengkaji tingkat kinerja e-government Kabupaten Banjar pada Domain Layanan SPBE menggunakan kuesioner terhadap responden yang telah ditentukan. Hasilnya Disperindag Kabupaten Banjar di level 1 level informasi dimana pelayanan SPBE menggunakan informasi satu arah.

Penelitian tingkat penerapan SPBE pada Pemkab Lumajang [11] dengan menggunakan

pedoman Peraturan Menteri PAN-RB [7] dilakukan pada Domain Kebijakan SPBE, Domain Tata Kelola SPBE dan Domain Layanan SPBE. Hasil yang didapat bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang mendapatkan nilai indeks sebesar 2,85 yang masuk kedalam predikat “BAIK” untuk tingkat penerapan SPBE.

Penelitian [12] pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar untuk mengevaluasi tingkat penerapan *e-government* dengan menggunakan kerangka kerja SPBE berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 mendapatkan hasil berupa predikat “BAIK” dengan nilai indeks rata-rata adalah 2,80 pada indikator-indikatornya. Penelitian ini berfokus pada Domain Layanan SPBE dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data didapat melalui wawancara serta observasi pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar.

Penelitian penerapan tingkat kematangan SPBE juga dilakukan pada Balai Diklat Aparatur (BDA) Sukamandi [13]. Pedoman evaluasi yang dipilih pada penelitian ini adalah berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018. Hasil yang didapat adalah indeks SPBE 1,85 menunjukkan predikat “CUKUP”. Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan SPBE di BDA Sukamandi belum terlaksana dengan baik. BDA Sukamandi belum menyusun *masterplan* implementasi SPBE. Perbaikan yang dituju adalah pada sektor pelayanan publik.

Penelitian dengan menggunakan kerangka kerja *E-Government Maturity Model* dilakukan pada Pemerintah Kota Gorontalo [14]. Penelitian ini menggunakan 35 indikator, 3 domain, dan 7 aspek SPBE. Penelitian ini mendapatkan indeks SPBE 2,88 sehingga masuk dalam kategori “BAIK”. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan SPBE di Kota Gorontalo berjalan dengan baik. Evaluasi serupa juga dilakukan oleh Wildan [15], menggunakan instrumen dari pedoman Permen PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Situbondo. Hasil dari penelitian ini adalah Kabupaten Situbondo memiliki indeks SPBE 2,79 sehingga masuk dalam kategori “BAIK”.

Penelitian mengenai penerapan SPBE [16] dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Kuningan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan layanan SPBE untuk proses bisnis dan aplikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Kuningan yaitu merancang *arsitektur enterprise SPBE* pada domain layanan dengan mengadopsi *framework* gabungan arsitektur TOGAF ADM dan arsitektur SPBE, sehingga menghasilkan beberapa Output dalam 3 tahap, yaitu tahap awal, visi arsitektur dan arsitektur layanan. Hasil dari penelitian ini berupa Katalog Pelayanan

Administrasi Pemerintahan dan Matriks Proses Bisnis yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan internal Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang, terdapat pembaruan metodologi penilaian tingkat kematangan SPBE, munculnya Domain Manajemen SPBE. Tidak diketahuinya nilai indeks kematangan Domain Manajemen SPBE, berarti tidak mungkin untuk mengukur tingkat implementasi manajemen SPBE di pemerintah daerah pada domain tersebut, sehingga sulit untuk merencanakan penerapan SPBE ke depan. Hal ini dapat mengakibatkan proses SPBE tidak berjalan lancar, atau dampak yang lebih fatal adalah gagalnya SPBE diterapkan pada pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui maturitas implementasi SPBE di Domain Manajemen SPBE Pemerintah Kota Yogyakarta dengan mengukur nilai dari indeks SPBE. Dengan mengetahui nilai dari indeks SPBE pada Domain Manajemen SPBE, diharapkan dapat diketahui sejauh mana tingkat penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya pada Domain Manajemen SPBE yang sudah berjalan sehingga perencanaan dan perbaikan dapat dilakukan agar penerapan SPBE dapat berjalan dengan baik dimasa depan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Untuk mengumpulkan data dengan tujuan membantu menyelesaikan penentuan penilaian evaluasi SPBE pada Pemerintah Kota Yogyakarta, penulis menggunakan wawancara, observasi dan evaluasi dokumen. Metode *purposive sampling* digunakan untuk memilih sampel untuk mengisi kuesioner. Sampel yang dipilih adalah orang-orang yang berkaitan langsung dengan hal-hal pada kriteria-kriteria penilaian evaluasi SPBE yaitu para kepala seksi dan kepala bidang serta operator SPBE di Dinas Kominfo Pemerintah Kota Yogyakarta.

Untuk perhitungan nilai indeks kematangan penerapan SPBE pada Domain Manajemen SPBE menggunakan pedoman yang ada pada Permen PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020.

2.1. PERTANYAAN PENELITIAN

Pertanyaan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Berapakah nilai indikator-indikator pada Domain Manajemen SPBE Pemerintah Kota Yogyakarta?
2. Berapakah nilai indeks tingkat kematangan Aspek – aspek pada Domain Manajemen SPBE pada Pemerintah Kota Yogyakarta?

3. Berapakah nilai indeks tingkat kematangan Domain Manajemen SPBE pada Pemerintah Kota Yogyakarta?
4. Apa saja yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan nilai Indeks Tingkat Kematangan SPBE di Domain Manajemen SPBE?

2.2. TAHAPAN PENELITIAN

Tahapan penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 1.

a. Studi Literatur

Penelitian literatur merupakan tahap awal dengan mengumpulkan informasi dan pengetahuan yang relevan dengan penelitian ini. Setelah konsep dasar penelitian ditentukan, langkah selanjutnya adalah menemukan teori yang mendasari dan teori pendukung yang akan digunakan untuk bahan acuan. Dari kumpulan referensi yang diperoleh, digunakan sebagai data kepustakaan. Pengumpulan data perpustakaan merupakan kewajiban penelitian untuk mengumpulkan landasan teori, hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran. Kumpulan literatur dari publikasi ilmiah, jurnal, peraturan pemerintah, dan model tingkat kematangan yang relevan dengan penilaian SPBE dilakukan pada tahap ini sebagai dasar teori penelitian.

b. Persiapan Instrumen Evaluasi

Untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, perlu disiapkan alat penelitian. Alat yang digunakan didasarkan pada pedoman penilaian SPBE yang tertuang dalam Peraturan Menteri PAN-RB[8], dengan fokus pada Domain Manajemen SPBE yang terdiri dari 2 aspek dan 11 indikator.

c. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui proses tanya jawab dan visitasi untuk mendapatkan data yang akan digunakan dalam proses penilaian tingkat kematangan SPBE. Menurut pedoman penilaian SPBE dalam Permen PAN-RB No. 59 Tahun 2020, pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara:

1. Proses Wawancara, proses pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau kuesioner kepada responden untuk mendapatkan jawaban berdasarkan pertanyaan yang diajukan.
2. Pelaksanaan visitasi, pengumpulan data pada proses ini dengan melakukan pengamatan dan kunjungan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) responden untuk proses validasi setelah wawancara.

d. Penggambaran Proses Bisnis

Penggambaran proses bisnis yang ada di OPD disesuaikan dengan indikator-indikator yang ada pada pedoman evaluasi SPBE. Proses bisnis tersebut

kemudian dikelompokkan sesuai dengan indikator-indikator pada Domain Manajemen SPBE.

e. Penilaian tingkat kematangan dan verifikasi data dukung

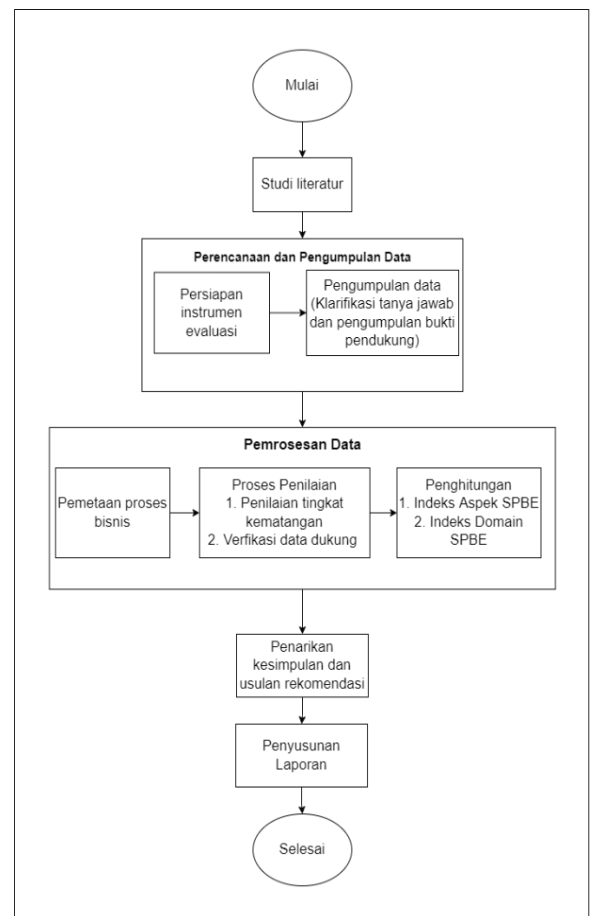
Proses penilaian dilakukan pada indikator-indikator Domain Manajemen SPBE setelah proses wawancara dan visitasi selesai. Kriteria tingkat maturitas kapabilitas proses terdiri atas skala 1 sampai dengan skala 5.

f. Penghitungan Indeks Aspek dan Domain SPBE

Perhitungan nilai indeks aspek dan domain pada Domain Manajemen SPBE dilakukan setelah semua indikator pada domain tersebut diberikan nilai tingkat kematangan dan berdasarkan persamaan yang telah ditentukan pada pedoman evaluasi SPBE.

g. Penarikan Kesimpulan dan Usulan Rekomendasi

Rekomendasi dan kesimpulan disusun setelah indeks dari Domain Manajemen SPBE diketahui. Dengan demikian, kondisi penerapan SPBE dapat diketahui sehingga dapat dilakukan penyusunan rekomendasi berupa area perbaikan yang akan ditindaklanjuti oleh OPD untuk memperbaiki penyelenggaraan SPBE.



Gambar 1. Tahapan Penelitian

2.3. INSTRUMEN EVALUASI

Instrumen penelitian merupakan hal penting yang perlu disiapkan supaya mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan pelaksanaan penelitian. Penelitian ini menggunakan instrumen evaluasi SPBE yang berpedoman pada Permen PAN-RB [8] yang berfokus pada Domain Manajemen SPBE yaitu terdiri dari 2 Aspek dan 11 Indikator seperti terlihat pada Gambar 2.

Domain 3 - Manajemen SPBE	
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	
Indikator 21 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	
Indikator 22 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	
Indikator 23 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	
Indikator 24 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	
Indikator 25 Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	
Indikator 26 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	
Indikator 27 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	
Indikator 28 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	
Aspek 6 - Pelaksanaan Audit TIK	
Indikator 29 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	
Indikator 30 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	
Indikator 31 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	

Gambar 2. Instrumen Evaluasi Domain Manajemen SPBE

2.4. PENGHITUNGAN NILAI INDEKS ASPEK SPBE

Nilai Indeks Aspek merepresentasikan kematangan lembaga negara atau pemerintah daerah dalam menerapkan aspek-aspek tertentu dari SPBE. Nilai indeks aspek diperoleh dari total nilai semua indikator dikalikan dengan total nilai dari bobot aspek tersebut seperti pada persamaan (1).

$$Indeks Aspek_i = \frac{1}{BA_i} \sum_{j=m}^n NI_{ij} \times BI_{ij} \quad (1)$$

dengan

- Indeks Aspek_i* = nilai dari indeks urutan ke-*i*
- BA_i* = bobot aspek urutan ke-*i*
- NI_{ij}* = Nilai kematangan indikator ke-*j* di aspek ke-*i*

2.5. PENGHITUNGAN NILAI INDEKS DOMAIN SPBE

Nilai indeks domain SPBE adalah nilai yang menjelaskan tingkat kematangan aplikasi SPBE dalam domain tertentu. Penghitungan nilai indeks domain SPBE menggunakan persamaan (2).

$$Indeks Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij} \quad (2)$$

dengan

- Indeks Domain_i* = Nilai domain urutan ke-*i*
- BD_{imain}* = Bobot domain urutan ke-*i*
- NA_{ij}* = Nilai aspek urutan ke-*j* di domain urutan ke-*i*
- BA_{ij}* = Bobot aspek urutan ke-*j* dalam domain urutan ke-*i*

2.6. PREDIKAT PENILAIAN SPBE

Setelah mendapatkan nilai indeks SPBE, maka nilai tersebut dapat diinterpretasikan kedalam predikat yang telah ditentukan sesuai dengan pedoman evaluasi SPBE [8]. Detail nilai dan predikat SPBE dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Predikat Penilaian SPBE

No.	Nilai Indeks	Predikat
1.	4,2 – 5,0	Memuaskan
2.	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3.	2,6 - < 3,5	Baik
4.	1,8 - < 2,6	Cukup
5.	< 1,8	Kurang

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian penerapan Domain Manajemen SPBE pada Pemerintah Kota Yogyakarta maka didapatkan nilai-nilai indikator sesuai dengan instrumen evaluasi SPBE pada Permen PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 yang kemudian bisa dilakukan penghitungan nilai indeks Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Pelaksanaan Audit TIK. Dari hasil nilai indeks kedua aspek tersebut, dapat dihitung nilai indeks Domain Manajemen SPBE.

3.1. ASPEK 5: PENERAPAN MANAJEMEN SPBE

Aspek Penerapan Manajemen SPBE terdiri dari 8 indikator. Nilai dari tiap indikator beserta bobotnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai Indeks Aspek Penerapan Manajemen SPBE

Indikator	Nilai Indikator (NI)	Bobot Indikator (BI) (%)	NI x BI (%)
Indikator 21	3	1,50	4,5
Indikator 22	3	1,50	4,5
Indikator 23	1	1,50	1,5
Indikator 24	3	1,50	4,5
Indikator 25	2	1,50	3,0

Indikator 26	1	1,50	1,5
Indikator 27	3	1,50	4,5
Indikator 28	5	1,50	7,5
Bobot Aspek (BA)		12	
Jumlah (NI x BI)			31,5
Indeks Aspek 5 SPBE			2,6

Dari Tabel 2, dapat dilihat bahwa Aspek Penerapan Manajemen SPBE mempunyai nilai indeks sebesar 2,6. Hal ini disebabkan oleh beberapa indikator dengan nilai rendah yaitu indikator 23 dengan nilai 1, indikator 25 dengan nilai 2 dan indikator 26 dengan nilai 1.

3.2. ASPEK 6: PELAKSANAAN AUDIT TIK

Aspek Pelaksanaan Audit TIK terdiri dari 3 indikator. Nilai dan bobot dari indikator-indikator pada aspek pelaksanaan audit TIK dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai Indeks Aspek 5 Pelaksanaan Audit TIK

Indikator	Nilai indikator (NI)	Bobot Indikator (BI) (%)	NI x BI (%)
Indikator 29	1	1,5	1,5
Indikator 30	1	1,5	1,5
Indikator 31	1	1,5	1,5
Bobot Aspek (BA)		4,5	
Jumlah (NI x BI)			4,5
Indeks Aspek SPBE			1

3.3. DOMAIN MANAJEMEN SPBE

Domain Manajemen SPBE terdiri dari 2 aspek. Setelah diketahui nilai indeks dari kedua aspek tersebut, maka nilai indeks untuk Domain Manajemen SPBE dapat dihitung. Penghitungan nilai indeks dari Domain Manajemen SPBE dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE

Aspek	Nilai Indeks Aspek (NA)	Bobot Aspek (BA) (%)	NA x BA (%)
Aspek 5	2,6	12	31,5
Aspek 6	1	4,5	4,5
Bobot Domain (BD)		16,5	36

Jumlah (Na x BA)

Indeks Domain Manajemen SPBE 2,2

Pada Tabel 4 terlihat bahwa nilai indeks Domain Manajemen SPBE adalah sebesar 2,2. Nilai ini termasuk dalam kategori rendah jika dibandingkan dengan nilai maksimal yaitu 5. Penyebabnya adalah nilai dari Aspek-Aspek yang rendah. Hal ini menunjukkan penerapan manajemen SPBE pada Pemerintah Kota Yogyakarta belum berjalan secara optimal. Masih banyak ruang untuk perbaikan dalam penerapan manajemen SPBE.

3.4. REKOMENDASI

Tahap berikutnya dari proses evaluasi SPBE setelah diketahui nilai indeks dari aspek dan nilai indeks dari domain adalah penyusunan rekomendasi. Tujuan utama dari penyusunan rekomendasi adalah untuk menyumbangkan saran perbaikan guna meningkatkan nilai indikator-indikator pada Domain Manajemen SPBE khususnya untuk indikator-indikator dengan nilai rendah. Dengan adanya rekomendasi, diharapkan penerapan SPBE dapat berjalan dengan lebih baik. Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta agar dapat memperbaiki nilai indikator-indikator dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Daftar Rekomendasi

Indikator	Rekomendasi
Indikator 21	Melakukan reviu dan evaluasi secara teratur terhadap penerapan manajemen risiko di Pemerintah Kota Yogyakarta serta menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan perbaikan penerapan manajemen risiko sehingga terdapat <i>improvement</i> terhadap residu risiko.
Indikator 22	Pelaksanaan evaluasi secara periodik perlu dilakukan pada pengendalian keamanan informasi. Berdasarkan output dari evaluasi, dilakukan perbaikan penerapan manajemen keamanan informasi.
Indikator 23	Melakukan pembuatan dan penetapan formal terhadap pedoman/ kebijakan Manajemen Data oleh Walikota Yogyakarta berdasarkan Permen PPN Nomor 16 Tahun 2020 yang diberlakukan menyeluruh ke semua unit kerja/OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta. Kemudian dilakukan evaluasi secara periodik. Hasil

	evaluasi ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan manajemen data sehingga menghasilkan pedoman manajemen data yang sudah termutakhirkan.
Indikator 24	Pelaksanaan reviu dan evaluasi terhadap penerapan manajemen aset TIK pada aplikasi Manajemen Aset Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta sebaiknya dilakukan secara periodik. Hasil dari rapat evaluasi ditindaklanjuti dengan perbaikan terhadap penerapan manajemen aset TIK pada aplikasi Manajemen Aset Daerah.
Indikator 25	Melakukan pemenuhan kebutuhan SDM dalam bidang kompetensi SDM SPBE melalui perekrutan ASN dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan SPBE, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada SDM yang sudah ada agar dapat memenuhi kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan, perekrutan Tenaga Teknis berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan.
Indikator 26	Menyediakan aplikasi manajemen pengetahuan pada aplikasi Jogja Smart Service (JSS) sehingga dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan.
Indikator 27	Melakukan evaluasi berkala dalam penerapan manajemen perubahan yang telah berjalan pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Hasil reviu dan evaluasi dapat berupa notulensi rapat, laporan evaluasi atau telaahan manajemen perubahan yang kemudian harus ditindaklanjuti untuk perbaikan manajemen perubahan SPBE.
Indikator 28	Interval pelaksanaan evaluasi mungkin bisa lebih diperpendek menjadi 6 bulan agar lebih cepat merespon jika terdapat keluhan pada layanan SPBE.
Indikator 29	Mengirimkan permohonan audit TIK kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk dilakukan audit infrastruktur.
Indikator 30	Mengajukan permohonan untuk dilaksanakan audit aplikasi SPBE ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Indikator 31	Mengirimkan permohonan untuk dilakukan audit keamanan SPBE kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang memang menangani bidang keamanan

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE Domain Manajemen SPBE di Pemerintah Kota Yogyakarta didapatkan hasil berupa nilai indeks tingkat kematangan Aspek 5 Penerapan Manajemen SPBE pada Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu sebesar 2,6, nilai indeks tingkat kematangan Aspek 6 Pelaksanaan Audit TIK sebesar 1,0 dan nilai indeks tingkat kematangan Domain Manajemen SPBE yaitu sebesar 2,2 sehingga masuk kedalam predikat "CUKUP". Untuk penerapan manajemen SPBE agar lebih efisien dan efektif, maka diperlukan tindakan perbaikan terutama untuk indikator-indikator dengan nilai rendah yaitu Indikator 23, Indikator 25, Indikator 26, Indikator 29, Indikator 30, dan Indikator 31.

Pemerintah Kota Yogyakarta selama ini menggunakan *best practice* dalam menjalankan SPBE. Proses penerapan SPBE belum menggunakan pedoman tatakelola SPBE yang baik, hanya berdasarkan pengalaman. Tatakelola SPBE yang baik dapat memudahkan dalam perencanaan penerapan SPBE dimasa depan sehingga proses SPBE dapat berjalan dengan lancar.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul selama penerapan SPBE, maka Pemerintah Kota Yogyakarta dapat melakukan hal-hal berikut ini:

1. Menyusun pedoman internal yang berisi pedoman proses manajemen data yang baik dan benar.
2. Merekrut tenaga teknis dengan keahlian yang disesuaikan dengan kompetensi SDM yang dibutuhkan, misalnya administrasi basis data.
3. Menyediakan aplikasi manajemen pengetahuan pada aplikasi Jogja Smart Service (JSS) sehingga dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan.
4. Mengirimkan permohonan audit aplikasi dan audit infrastruktur TIK ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
5. Membuat permohonan untuk dilaksanakan audit keamanan TIK ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Untuk pengembangan penelitian berikutnya, dapat dilakukan evaluasi SPBE terhadap domain lainnya atau terhadap seluruh domain SPBE pada Pemerintah Kota Yogyakarta agar mendapatkan nilai indeks SPBE secara keseluruhan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Y. Yusriadi and U. Farida. 2019. "Bureaucracy Performance in Public Services in Indonesia," *J. Ad'ministrare*, vol. 6. no. 1, p. 17 . Doi:

- 10.26858/ja.v6i1.9434.
- [2] N. Nuriyanto. 2014. "Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep 'Welfare State'?", *J. Konstitusi*, vol. 11. no. 3, pp. 428–453
- [3] M. Silalahi, D. Napitupulu, and G. Patria. 2015. "Kajian Konsep dan Kondisi E-Government di Indonesia," *Tekno. Inf. dan Komun.*, vol. 1. no. 1, pp. 10–16
- [4] Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- [5] E. E. Supriyanto. 2016. "Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia," *J. Ilmu Pemerintah. Kaji. Ilmu Pemerintah. dan Polit. Drh.*, vol. 1. no. 1, p. 141. Doi: 10.24905/jip.v1i1.438.
- [6] Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- [7] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- [8] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- [9] I. M. Sukarsa., I. B. A. Paramartha., A. A. K. A. Cahyawan., K. S. Wibawa., P. G. A. S. Yasa., N. M. S. Wulanyani., N. W. Wisswani. 2020. "Evaluation of E-Government Maturity Models in Sub-District Public Services in Indonesia Using the SPBE Framework," *J. RESTI (Rekayasa Sist. dan Teknol. Informasi)*, vol. 4. no. 2, pp. 243–253. Doi: 10.29207/resti.v4i2.1825.
- [10] M. R. Y. Saputra, W. W. Winarno, and Henderi. 2020. "Evaluasi Tingkat Kematangan SPBE di Disperindag Kabupaten Banjar Menggunakan CMMI Dev. Versi 1.3," *Indones. J. Bus. Intell.*, vol. 3. no. 1, pp. 14–19. Doi: 10.21927/ijubi.v3i1.1188.
- [11] M. A. R. FIRDAUS. 2019. "Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Lumajang Menggunakan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE", p. 69 Tersedia melalui: Perpustakaan Universitas Jember < <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/97914> > [Diakses 17 Oktober 2021]
- [12] H. D. Pratiwi, W. Hayuhardhika, N. Putra, and A. D. Herlambang. 2020. "Evaluasi Penerapan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar Menggunakan Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)", *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 4. no 11, pp. 4116–4124 Tersedia melalui: Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM) Universitas Brawijaya <<https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/8249>> [Diakses 17 Oktober 2021]
- [13] S. R. Utami. 2019. "Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada BDA SUKAMANDI", Tersedia melalui: Widyatama University Library < <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/11730> > [Diakses 17 Oktober 2021]
- [14] A. A. Bouty, M. H. Koniyo, and D. Novian. 2019. "Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan E-Government Maturity Model (Kasus di Pemerintah Kota Gorontalo)," *J. Penelit. Komun. Dan Opini Publik*, vol. 23. no. 1. Doi: 10.33299/jpkop.23.1.1758.
- [15] W. Z. FAKI. 2019. "Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Situbondo Menggunakan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE", Tersedia melalui: Perpustakaan Universitas Jember < <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/99193> > [Diakses 14 September 2021]
- [16] A. S. Qotrunnisa. 2021. "Model Arsitektur Layanan Administrasi Pemerintahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah Kuningan," *JIKO (Jurnal Inform. dan Komputer)*, vol. 4. no. 3, pp. 187–192. Doi: 10.33387/jiko.